

**ANALISIS KEBIJAKAN KAWASAN PERMUKIMAN SEBAGAI
KAWASAN HUTAN LINDUNG STUDI KASUS : KAMPUNG
TIRTOMULYO KELURAHAN PINANG KENCANA TANJUNGPINANG**

Oleh

YESI VALENTINE

NIM.2205020056

ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan kawasan hutan lindung di Indonesia sering kali tidak mempertimbangkan realitas sosial masyarakat yang telah lama bermukim sebelum penetapan status kawasan. Kampung Tirtomulyo di Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang, menjadi salah satu contoh nyata dari persoalan ini. Kampung yang dihuni sekitar 180 keluarga tersebut secara resmi berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulau berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 955/Kpts-II/1992, meskipun bukti kepemilikan lahan warga sudah ada sejak 1973. Akibatnya, warga mengalami hambatan layanan publik dasar seperti listrik dan administrasi kependudukan selama lebih dari tiga dekade tanpa penyelesaian kebijakan yang pasti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menangani kawasan permukiman di dalam Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulau serta menganalisis interaksi antara arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*politics stream*) dalam mempengaruhi terbukanya *policy window* bagi penyelesaian kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan *Multiple Streams Framework* (MSF) yang dikembangkan oleh Kingdon (1984) sebagai kerangka analisis utama. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengapa proses kebijakan penyelesaian konflik permukiman Kampung Tirtomulyo berjalan lambat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan lindung.

Kata kunci: kebijakan publik, kawasan hutan lindung, permukiman, *Multiple Streams Framework*, Kampung Tirtomulyo

**POLICY ANALYSIS OF RESIDENTIAL AREAS WITHIN PROTECTED
FOREST ZONES: A CASE STUDY OF KAMPUNG TIRTOMULYO, PINANG
KENCANA SUB-DISTRICT, TANJUNGPINANG**

By

YESI VALENTINE

NIM.2205020056

ABSTRACT

Forest protection area management policy in Indonesia often fails to account for the social realities of communities that have settled long before a forest's protected status was designated. Kampung Tirtomulyo in Pinang Kencana Sub-district, Tanjungpinang City, exemplifies this issue. Home to roughly 180 families, the settlement officially falls within the Sungai Pulai Protected Forest under Forestry Minister Decree No. 955/Kpts-II/1992, even though residents' land ownership evidence dates back to 1973. As a result, residents have faced barriers to basic public services such as electricity and civil registration for more than three decades without a definitive policy resolution. This study aims to analyze government policy in addressing the settlement area within the Sungai Pulai Protected Forest and to examine the interaction between the problem stream, policy stream, and politics stream in shaping the opening of a policy window for resolving the case. The study employs a descriptive qualitative approach using the Multiple Streams Framework (MSF) developed by Kingdon (1984) as its main analytical framework. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. This research is expected to explain why the policy process for resolving the Kampung Tirtomulyo settlement conflict has proceeded so slowly, and to offer policy recommendations that are more responsive and equitable for the community while preserving the ecological function of the protected forest area.

Keywords: public policy, protected forest area, settlement, Multiple Streams Framework, Kampung Tirtomulyo